UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# BAB II

# TELAAH PUSTAKA

## 2.1. Telaah Pustaka

### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory)*

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*agent)* menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional (*principal)* yang lebih mengerti menjalankan bisnisnya sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefesien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga professional. Mereka, para tenaga-tenaga professional bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para professional tersebut berperan sebagai manajemen pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham. Sementara pemilik perusahaan (manajemen) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh pemegang saham serta mengembangkan sistem insentif bagi manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan (**Andrian Sutedi 2011**).

Namun pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Ada keleluasaan pengelola pemegang saham perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. lebih lanjut pemisahan ini pula dapat menimbulkan kurang transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta pertimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas.

Teori ini memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan *agent* dengan *principal* atau *principal* dengan *principal*. Teori ini muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan terdapat dimana-mana khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern, sehingga teori perusahaan yang klasik tidak bisa lagi dijadikan basis analisis perusahaan seperti itu. Pada teori perusahaan klasik, pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta, mengendalikan sendiri perusahaannya, mengambil keputusan demi kehidupan perusahaannya, sehingga yang diharapkan adalah maksimum profit sebagai syarat mati untuk bisa hidup dan berkembang.

Dalam teori perusahaan klasik, kebutuhan modal dan keterampilan manajeial perusahaan dengan skala atomistik dipasok oleh satu sumber saja yaitu pemilik yang berwiraswasta. Namun dalam teori agensi kebutuhan perusahaan yang berskala besar,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

keterampilan manajerial dipasok oleh pasar tenaga kerja manajerial, kebutuhan modal dipasok oleh pemegang saham (*shareholder)*, dan pemberi pinjaman (*debt holder).* Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi, terlintas adanya semangat menuduh salah satu pihak untuk mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri pada hubungan kerja sama. Dalam hubungan *agent-principal*, pihak *agent* memanfaatkan kesempatan, dan dalam hubungan antara *shareholder (principal)* dengan *debt holder (principal)* pihak pemegang saham yang mengambil kesempatan dari hubungan tersebut.

Pada skala perusahaan seperti ini dimana kepemilikannya tersebar serta pengelolaan dapat dikatakan terpisah dari kepemilikan serta dimungkinkan penggunaan sumber dana lain berupa pinjaman menyebabkan analisa haru dilakukan dengan teori agensi. Asumsi yang dipergunakan dalam teori ini adalah sebagai berikut :

a. Dalam pengambilan keputusan seluruh individu bisa mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu *agent* yang mendapatkan kewenangan dari *principal* memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan sendiri.
b. Individu mempunyai jalan pikiran yang rasional, sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias atas suatu dampak dari masalah agensi serta nilai harapan keuntungannya dimasa depan. Oleh karena itu, dampak dari perilaku

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menyimpang dari kepentingan pihak lainnya yang terkait langsung dapat dimasukkan kedalam pertimbangan pihak lainnya dalam memasok kebutuhan.

Definisi yang baik untuk mengambarkan hubungan agensi antara pemegang saham (*shareholder)* dengan *agent*, adalah definisi yang dibuat oleh **Andrian Sutedi** (**2011**) : teori agensi adalah hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih pihak (*principal)* melibatkan pihak lain (*agent)* untuk melakukan beberapa layanan atas nama *principal.* Kedua belah pihak ini disatukan oleh sebuah perjanjian atau kontrak kerja untuk mengatur hubungan,wewenang serta tanggung jawab diantara mereka. Pemegang saham sebagai *principal* memberikan atau mendelegasikan wewenangnya kepada manajemen (*agent)* untuk menjalankan perusahaan dan menggunakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan membuat keputusan yang dapat menguntungkan para pemilik perusahaan.

Konflik keagenan disebabkan oleh pembuatan keputusan aktivitas pencairan dana *(financing decision)* dan pembuatan keputusan bagaimana dana tersebut diinvestasikan. Selain itu, perspektif teori agensi laba sangat rentan terhadap manipulasi oleh manajemen. Informasi laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu akan mengurangi asimetri informasi yang berkaitan erat dengan *agency theory*. Sehingga dalam hubungan keagenan, manajemen diharapkan dalam mengambil kebijakan perusahaan terutama kebijakan keuangan yang menguntungkan pemilik perusahaan. Oleh sebab itu sebagai pengelola, manajemen (agent) berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan terhadap pemilik (principal).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masalah agensi disebabkan karena adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). **Andrian Sutedi** (**2011**), menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis yaitu:

a. Biaya Monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
b. Biaya Bonding (*bonding cost*), merupakan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan *principal*, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen, bahwa *principal* akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.
c. Biaya Kerugian Residual (*residual loss*), yaitu nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh *principal* akibat perbedaan kepentingan

Untuk meminimalkan *agency problem*, dapat digunakan kontrak antara agen dan *principal*. Adanya sistem informasi yang memadai dapat pula digunakan untuk meminimalkan *agency problem* ini. Dengan adanya kontrak atau perjanjian dan informasi yang memadai ini maka agen akan bertindak sesuai kepentingan *principal.*

Dalam hubungan agensi antara pemegang saham (*principal)* dengan pengelola (*agent)* ini, teori agensi menunjukkan adanya tiga unsure lagi yang bisa mengekang perilaku menyimpang pengelola (*agent)* yaitu : pertam*a*, unsur bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial. Kedua, bekerjanya pasar modal. Dan *ketiga* unsur bekerjanya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pasar bagi keinginan menguasai dan memiliki atau mendominasikan kepemilikan perusahaan (*market for corporate control).*

### 2.1.2. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak–pihak di luar korporasi. Definisi laporan keuangan menurut **Baridwan** (**2004**) pada penelitian **Indra Dewi Suryani** (**2010**), yaitu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Manajemen membuat laporan keuangan dengan tujuan untuk mempertnggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No 1 2009: laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasimengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaansumber daya yang dipercayakan kepada mereka Laporan keuangan menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang disajikan adalah :

1. Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas pemilik

dalam sumber daya bersih. Neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.

2. Laporan Laba Rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Investor dan kreditor menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan, memberikan dasar untuk memprediksikan kinerja masa depan, membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan.
3. Laporan arus Kas menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode. Laporan arus kas melaporkan kas yang mempengaruhi operasi selama suatu periode, transaksi investasi, transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode.
4. Laporan ekuitas pemilik atau sering disebut laporan perubahan ekuitas pemegang saham melaporkan perubahan dalam setiap akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama tahun berjalan.
5. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, Laporan Laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta laporan tambahan sepert kewajiban kontijensi dan komitmen.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

### 2.1.3. Pandangan Islam Tentang Biaya Hutang

Hutang adalah suatu transaksi di mana seseorang meminjam harta benda kepada orang lain dengan janji akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Hutang termasuk muamalah (transaksi) antara manusia yang cukup mendapat perhatian dalam Islam karena ada unsur ekonomi dan hak individu yang dalam Islam sangat dihormati. Dalam **Islam,** tentunya **muamalah hutang-piutang** adalah muamalah yang dibolehkan. Dan ini masuk dalam bab *at-ta'awun alal birri wat taqwa* (التعاون على البر والتقوى), **saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan**. Jadi, semboyah **hutang-piutang itu harus** *ta'awun***(saling tolong menolong),** bukan membinasakan–mengeruk keuntungan sebanyak-banyak dari **muamalah hutang-piutang.** Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

**...“ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...**

*(Dan) tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa. Dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan maksiat (pelanggaran) ... ”* (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 2)

Namun, walaupun hutang itu dibolehkan, sebaiknya seorang muslim hendaklah menghindarinya, karena hutang itu dapat mendatangkan kehinaan dan menjadi sebab terhalangnya seorang hamba masuk surga, bahkan bisa menjadi sebab terjerumusnya ia ke dalam neraka.

Walaupun berhutang itu boleh (mubah), namun hendaknya dilakukan untuk kebutuhan yang penting dan mendesak karena ada bahaya apabila tidak mampu

membayar hutang. Jangan hutang untuk kebutuhan konsumtif seperti memperbarui mobil atau mengganti perabot rumah yang masih cukup baik.

Padahal kami selalu memberi kelonggaran padanya, jika dia memang belum punya uang untuk membayarnya, seperti yang diajarkan Allah dalam firman-Nya di surah Al Baqarah (2) ayat 280;

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “ Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

**2.1.4. Biaya Hutang**

**Fabozzi** (**2007**) mendefinisikan *cost of debt* sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. Menurut PSAK No.26 biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman meliputi antara lain bunga atas penggunaan dana pinjaman baik pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek, amortisasi atas biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan selisih kurs atas pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs tersebut merupakan penyesuian terhadap biaya bunga)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

atau amortisasi premi kontrak valuta berjangka panjang dalam rangka *hedging* dana yang dipinjam dalam valuta asing.

**Pittman dan Fortin** (**2004**) mengukur *cost of debt* sebagai beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut. Hal ini mengingat bahwa perusahaan biasanya memiliki hutang tidak hanya kepada satu pihak kreditur saja, melainkan kepada beberapa pihak, dimana besar tingkat bunga yang ditetapkan oleh masing-masing pihak tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu, biaya hutang dapat dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan diproporsikan terhadap pokok pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut. Instrumen hutang ini dapat berupa hutang bank (*bank loan),* obligasi, sewa guna usaha (*leasing),* dan hutang lainnya.

**2.1.5.*Good Corporate Governance***

Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk mengikat keberhasilan usaha dan akuntanbilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan *(stakeholder)* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Menurut *Forum for Corporate Governance*

*in Indonesia* (FCGI, 2001), *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) di dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* tahun 2006 mengembangkan beberapa asas-asas GCG, yaitu (KNKG, 2006):

1) Transparansi (*transparancy)*

   Untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang memiliki kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntantabilitas (*accountability)*

   Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Responsibilitas (*responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi (*independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan kesetaraan (*fairness)*

Ketika melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Salah satu lembaga independen yang berfokus pada penilaian penerapan konsep *Corporate Governance* diperusahaan yang telah melakukan riset mengenai penerapan *Corporate Governance* di Indonesia adalah *Indonesian Institute Of Corporate Governance*. *Indonesian Institute Of Corporate Governance* (IICG) berdiri pada tanggal 2 Juni 2000 atas prakarsa Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), prakarsa dan professional serta tokoh masyarakat yang memiliki visi dan kepedulian terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik. Tujuan membentuk IICG adalah untuk memasyarakatkan konsep *Corporate Governance* dan manfaat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penerapan prinsip – prinsip GCG seluas-luasnya dalam rangka mendorong terciptanya dunia usaha Indonesia yang bermatabat.

Salah satu program yang terus menerus dilaksanakan IICG sejak tahun 2001 hingga sekarang adalah *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yaitu program riset dan penerapan pemeringkatan penerapan *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *corporate governance* (CG) dengan melaksanakan evaluasi dan *beachmarking* sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan (*connuous improvement).*

### 2.1.6. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

CGPI telah diselengarakan oleh IICG bekerja sama dengan Majalah SWA sebagai program *run* tahunan sejak tahun 2001 sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang bermartabat. Kepersetaan CGPI bersifat sukarela dan melibatkan peran aktif perusahaan dan bersama seluruh *stakeholder* dalam memenuhi tahapan pelaksanaan program CGPI, dan hal menunjukkan komitmen bersama dalam memasyarakatkan GCG, karena program CGPI berupaya mendorong dan menuntut perusahaan peserta untuk melakukan perbaikan atau peningkatan praktek GCG di lingkungannya.

#### 2.1.6.1. Tujuan Program Riset dan Manfaat Pemeringkatan CGPI

Kontribusi IICG mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG di Indonesia melalui penyelenggaraan program riset dan pemeringkatan CGPI untuk menciptakan

praktik bisnis yang etikal, sehat, bermartabat dan berkelanjutan. Program CGPI mengajak seluruh pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat bisnis dan pihak pendukung bisnis melakukan praktik terbaik GCG dan berbagai kegiatan diseminasi konsep CG dalam rangka mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan khususnya memperhatikan proses penciptaan nilai tambah bagi *stakeholder*.

**2.1.6.2. Sistem Penilaian CGPI**

Metodologi riset yang dipakai meliputi empat tahapan riset yang melibatkan pihak internal dan eksternal *stakeholder* perusahaan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuisioner, penentuan skor pelaksanaan dilakukan melalui rata-rata tertimbang dengan bobot masing-masing aspek disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Aspek Penilaian *Corporate Governance Perception Index***

| NO | Aspek Penilaian | Bobot (%) |
|---|---|---|
| 1 | Komitmen terhadap tata kelola perusahaan | 15 |
| 2 | Hak pemegang saham | 20 |
| 3 | Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham | 15 |
| 4 | Peran *stakeholder* dalam tata kelola perusahaan | 15 |
| 5 | Pengungkapan dan transparansi | 15 |
| 6 | Tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi | 20 |

**Sumber : Laporan CGPI 2014**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara lengkap tahapan riset diawali dengan pengembangan metodologi *database*, publikasi program, konfirmasi peserta CGPI, serta penyebaran kuisioner (*self assessment*). Tahap pemeriksaan kelengkapan dokumentasi yang dilakukan bertujuan untuk menelusuri upaya dan mewujudkan penerapan GCG sebagai sebuah system yang dilakukan peserta CGPI dengan mengacu pada daftar dukumen yang disyaratkan dibuat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pemenuhan regulasi, kebijakan, pedoman dan praktek terbaik dalam penerapan GCG di Indonesia dan Negara lain secara keseluruhan dipersyaratkan sekurang-kurangnya 40 dokumen untuk perusahaan public dan 36 dokumen untuk BUMN.

Tahapan riset berikutnya adalah penyususnan makalah yang merefleksikan program dan hasil penerapan GCG sebagai sebuah system diperusahaan. Penyusunan makalah dimaksudkan untuk membantu pihak perusahaan memaparkan upayanya dalam menerapkan GCG pada saat observasi. Observasi merupakan kegiatan peninjauan langsung keseluruh perusahaan peserta CGPI untuk memastikan praktek penerapan GCG sebagai sebuah system pengelolaan bisnis di perusahaan penilaian GCG meliputi empat tahapan dengan bobot nilai yang berbeda. Bobot nilai disajikan dalam tabel 2 berikut :

**Tabel 2.2**

**Tahapan dan Bobot Nilai CGPI**

| No | Tahapan | Bobot (%) |
|---|---|---|
| 1 | Self Assesment | 17 |
| 2 | Kelengkapan dokumen | 35 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Kelengkapan makalah yang merefleksikan hasil penerapan GCG sebagai system perusahaan yang bersangkutan | 13 |
| 4 | Observasi | 35 |

**Sumber : Laporan CGPI 2014**

Nilai CGPI dihitung dengan menjumlahkan nilai akhir dari setiap tahapan diatas. Hasil program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan peserta dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang telah dibuat. Pemeringkatan GCG didesain menjadi 3 komponen berdasarkan tingkatan atau level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG seperti disajikan pada tabel 3 berikut ini :

**Tabel 2.3**
**Skor Penilaian Riset dan Kriteria Peringkat CGPI**

| Kategori | Skor Penilaian | Kriteria |
|---|---|---|
| A | > 85-100 | Sangat Terpecaya |
| B | > 70-85 | Terpecaya |
| C | > 55-70 | Cukup Terpecaya |

**Sumber : Laporan CGPI 2014**

### 2.1.7. *Corporate Governance Index*

*Corporate Governance Index* merupakan alat penjamin bagi kreditor bahwa dana yang diberikan dikelola dengan baik, oleh karena itu kreditor tidak ragu untuk memberikan pendanaan terhadap perusahaan tersebut. Kreditor menilai perusahaan dengan *Corporate Governance Index* tinggi mampu mengembalikan dana yang dipinjamnya karena perusahaan tersebut dikelola dengan baik. Sedangkan perusahaan dengan nilai *corporate governance* yang rendah akan sulit mendapatkan pendanaan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

karena kreditor ragu-ragu dalam memberikan dana kepada perusahaan tersebut (**Rebecca, 2012**).

Manfaat utama bagi perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* adalah mendapatkan kepercayan dari investor dan masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* diakui mampu meningkatkan kredibilitas dan kinerja perusahaan. Penerapan *good corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan secara konsisten dari tahun ke tahun dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi *shareholders* dan juga *stakeholders* perusahaan. *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) adalah suatu lembaga independen di Indonesia yang didirikan untuk menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik dengan mempromosikan perilaku perusahaan yang etis dan meningkatkan ketrampilan, pengetahuan, serta kemampuan direksi dan dewan komisaris perusahaan.

Aktivitas IICD berkonsentrasi pada pendidikan profesi bagi direktur dan komisaris, penelitian tentang *governance* perusahaan, direktur, dan kinerja, serta advokasi dalam pendidikan dan penelitian. Peran penting IICD adalah internalisasi praktek *corporate governance* yang baik dimana IICD secara konsisten telah melakukan penilaian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Studi ini dimulai sejak tahun 2005 yang melibatkan 61 perusahaan publik terkemuka di Indonesia pada awalnya. Namun, saat ini, penilaian yang dilakukan oleh IICD telah meliputi seluruh perusahaan publik

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) IICD-CIPE Indonesia GCG Scorecard (2007) menjelaskan tujuan utama dari *Corporate Governance Index* yang dipublikasikan oleh IICD, antara lain :

*a.* Menyediakan alat analisis untuk meningkatkan penerapan prinsip *good corporate governance*

*b.* Membantu pihak regulator atau pemerintah untuk memperkuat praktek *corporate governance* dan akutanbilitas

*c.* Memberikan informasi bagi investor dan kreditur dalam menilai praktek *corporate governance* perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Sebagai *benchmark* praktek *corporate governance* di Indonesia terhadap praktek-praktek serupa di negara Asia lainnya. Diharapkan bahwa *benchmark* ini dapat digunakan untuk terus meningkatkan pelaksanaan praktek *corporate governance* di Indonesia.

### 2.1.8. Struktur Kepemilikan

Isu penting dalam *corporate governance* adalah struktur kepemilikan atau pihak yang memegang kendali didalam perusahaan. Struktur kepemilikan adalah jenis institusi atau perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (**Sabrina,2010**). Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya  kemampuan untk mempengaruhi jalannya perusahaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Dengan demikian *agency problem* dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan, struktur kepemilikan pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional

**a. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana seorang manajer disuatu perusahaan merangkap juga sebagai pemegang saham didalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi dengan adanya kebijakan perusahaan untuk membayarkan upah dan gaji seorang manajer dengan cara mengganti uang tunai dengan lembaran saham atas nama perusahaan tersebut. **Wicaksono** (**2013**) menjelaskan jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan. Dengan demikian, maka para manajer dapat bertindak lebih konsisten dan terbuka untuk menguntungkan diri pemegang saham dan kepentingan pribadinya. Dan hal ini dapat mengurangi terjadinya *agency problem* didalam sebuah perusahaan.

Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial, kebijakan ini dimaksudkan untuk member kesempatan kepada manajer terlibat dalam kepemilikan

saham sehingga dengan keterlibatan manajer tersebut bisa mengurangi adanya asimetri informasi didalam suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi,diharapkan dengan keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat secara efektif meningkatkan kinerja manajer. kepemilikan manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan bila manajer memiliki saham perusahaan yang lebih besar. Kualitas informasi yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial, tekanan dari pasarmodal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan.

Pengukuran kepemilikan manajerial diukur dengan cara menghitung proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Proporsi kepemilikan manajerial dapat dilihat dari jumlah lembar saham yang dimiliki karyawan perusahaan, manajer, maupun direktur pada struktur kepemilikan keseluruhan yang ada dalam laporan keuangan tahunan.

**b. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh suatu badan atau pemilik institusional, seperti pemerintah, asuransi dan bank. Para investor institusional ini biasanya bertindak sebagai pihak yang memonitor jalanya sebuah perusahaan, dan didalam melakukan monitoring, investor

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

institusional ini lebih berpihak kepada para pemegang saham, seperti yang dikatakan **Wicaksono** (**2013**) bahwa monitoring yang dilakukan oleh investor institusional tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional dalam sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang mencakup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer.

Investor institusional memiliki beberapa kelebihan dbandingkan dengan investor individual, diantaranya adalah :

a) Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih dari pada investor individual untuk mendapatkan informasi
b) Investor institusional memilki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi
c) Investor institusioanl secara umum memiliki realisasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen
d) Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan
e) Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin ditingkat harga.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepemilikan institusional dapat mengurangi insentif manajemen yang mungkin melakukan suatu hal yang berhubungkan dengan kegiatan operasional perusahaan yang mementingkan kepentingan manajemen sendiri. Jika investor institusional mempunyai kepemilikan saham dalam jumlah besar, maka mereka mempunyai hak untuk mengawasi perilaku dan kinerja manajemen dengan lebih ketat. Pengawasan tersebut dapat ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar sehingga bila investor institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya kepasar.

Mekanisme pengawasan dapat dilakukan dengan menempatkan dewan ahli, dalam hal ini bisa menggunakan komite audit independen sehingga posisinya tidak berada dibawah pengawasan manajer. Dengan demikian, dewan ahli dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk mengontrol semua tindakan manajer, pengawasan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi manajer dalam menjalankan usaha dan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Semakin besar kepemilikan saham oleh institusional akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dan mengurangi *agency cost.*

Pengukuran kepemilikan institusional diukur dengan cara menghitung proporsi saham biasa yang dimiliki oleh lembaga institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Proporsi kepemilikan institusional dilihat dari jumlah lembar

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

saham yang dimiliki lembaga institusi seperti pemerintah, bank, asuransi dan lain sebgainya pada struktur kepemilikan keseluruhan yang ada dalam laporan keuangan tahunan.

### 2.1.9. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan. **Sudarmadji dan Sularto** (**2007**) besar ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan *logaritma natural* dari total asset. Perusahaan yang memiliki total asset besar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang kecil. Dengan mengungkapkan informasi lebih banyak, perusahaan mencoba mengisyaratkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan dengan baik (*Good Corporate Governance*). Meningkatkan pengungkapan informasi akan mengurangi asimetri informasi. Biaya agensi timbul karena kepentingan yang bertentangan dari pemegang saham, manajer, dan pemilik hutang (**Setiana dan Kusbandiyah, 2009**).

Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga kreditur akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat disamping itu juga mendapat sorotan publik yang lebih dibandingkan perusahaan kecil (**Rebecca, 2012**). Perusahaan besar dimungkinkkan akan memiliki asset yang lebih besar, perusahaan akan lebih sering diawasi oleh para kelompok *stakeholder* yang berkepentingan dengan bagaimana mengelola sumber dana.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pengukuran ukuran perusahaan diukur dengan cara menghitung *logaritma natural* total asset yang dimiliki perusahaan. total asset diyakini dapat menilai kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi dan bersaing untuk periode selanjutnya. Jumlah asset perusahaan yang tinggi dinilai dapat untuk melunasi kewajiban dari perusahaan tersebut, perusahaan dengan asset tinggi mudah untuk mendapatkan pendanaan.

### 2.1.10. *Tax Avoidance*

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal.

Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang masih berada di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (**Nur, 2010**). Pengertian *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang lain adalah

suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (**Mardiasmo, 2003** ). Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

## 2.11. Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Judul | Publikasi | Variabel Penelitian | Alat Analisis | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina (2015) | Pengaruh *Corporate Governance Index*, Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Hutang | Jurnal Analysis Acccounting Vol.4 No.3 Tahun 2015 | **Variabel Independen (X) :** *Corporate Governance Index*, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan institusional dan Ukuran Perusahaan **Variabel Dependen (Y) :**Biaya Hutang | Uji Adjusted $R^2$ | Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variable *corporate governance index,*dan kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap biaya hutang. Sedangkan variable ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh positif terhadap biaya hutang . |
| 2 | Vhika Meiriasari (2017) | Pengaruh *Corporate Governance*, Kepemilikan Kelurga, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan | Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Vol. 8 No. 01 Tahun Juli 2017 | **Variabel Independen (X)** : *Corporate Governance,* Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional | Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Model | Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa *corporate governance*, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan (*firm size*) bersama-sama memiliki pengaruh terhadap biaya utang. Sedangkan hasil pengujian yang dilakukan untuk masing-masing variabel |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (*Firm Size*) Terhadap Biaya Hutang | | Dan Ukuran Perusahaan **Variabel Dependen (Y)** : Biaya hutang | | terhadap biaya utang adalah tiga dari empat variabel penelitian yaitu *corporate governance*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan (*firm size*) yang terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap biaya utang. Sedangkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap biaya utang. |
| 3 | Yullisa Rebecca dan Sylvia Veronica Siregar (2009) | Pengaruh *Corporate Governance Index*, Kepemilikan Keluarga, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Hutang (*Cost Of Debt)* | Jurnal Akuntansi Keuangan Vol.11 No.2 November 2009 | **Variabel Independen (X)** : *Corporate Governance Index*, Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan Institusional **Variabel Dependen (Y)** : Biaya Hutang (*Cost Of Debt)* | Statistic Deskriptif | *Corporate governance index* terbukti memiliki pengaruh negative signifikan terhadap biaya hutang. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dari praktek *corporate governance* suatu perusahaan dapat mengurangi biaya hutang |
| 4 | Dwi Ricky Nugroho dan Wahyu | Pengaruh *Corporate Governance* | Jurnal Of Accounting Vol. 3 No.3 | **Variabel Independen (X)** : | Analisis regresi berganda dan | Pengujian hipotesis yang menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan nilai 0,228 untuk biaya hutang sehingga |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meiranto (2014) | *Index* Terhadap Biaya Hutang | Tahun 2014 Halaman 2 | *Corporate Governance Index* **Variabel Dependen (Y)** : Biaya Hutang | Statistik Deskriptif | dapat dikatakan model regresi dalam melakukan prediksi. |
| 5 | Indah Masri dan Dwi Martini (2011) | Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* | Jurnal of economic Vol.5 No.3 Tahun 2011 | **Variabel Independen (X)** : Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial **Variabel Dependen (Y)** : Biaya Hutang | Statistik Deskriptif,dan Uji Asumsi Klasik | Pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* adalah positif |
| 6 | Bustanul Aripin (2015) | Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap | Jurnal *Accounting* Vol.1 No.4 Tahun 2015 | **Variabel Independen (X) :** *Return On Investment, Economic Value Added* **Variabel Dependen (Y)** : *Return* | Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Koefesien Determinasi ($R^2$) dan Uji Hipotesis | Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang serta kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Biaya Hutang (*Cost Of Debt)* | | Saham | | |
| 7 | Zulfa Kurniawati dan Marfuah (2014) | Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Biaya Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Diindonesia | Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 5 No.2 Desember 2014 | **Variabel Independen (X)** : Efektivitas Dewan Komisaris, Efektivitas Komite Audit dan Audit Tenure Serta Kualitas Audit **Variabel Dependen (Y)** : Biaya Hutang | Regresi Linear Berganda dan Uji Asumsi Klasik | Hanya variable audit tenure yang terbukti berpengaruh negative signifikan terhadap baiya hutang perusahaan |
| 8 | Nancy Yunita (2012) | Pengaruh *Corporate Governance Index* Terhadap Voluntary Disclosure dan Biaya Hutang | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 1 No.1 Januari 2012 | **Variabel Independen (X):** Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Audit **Variabel Dependen (Y):** Voluntary | Analisis regresi dan Uji Hipotesis | Hasil penelitian ini banyak hipotesis yang tidak didukung karena penerapan *corporate governance* hanya untuk memenuhi peraturan yang berlaku. |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Disclosure dan Biaya Hutang | | |
| 9 | Janica Ekasanti Santosa dan Heni Kurniawan (2014) | Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt* Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Selama Periode 2010-2014 | Jurnal economic Vol.3 No. 4 Tahun 2014 | **Variabel Independen (X)** : *Tax Avoidance* **Variabel Dependen (Y)** : *Cost Of Debt* | Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Hipotesis dan Koefesien Determinasi | Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. *Tax avoidance* sebagai variable independen diukur dengan menggunakan ETR. |
| 10 | Elsa Marcellina dan Anna Purwaningsih (2012) | Elsa Marcellina dan Anna Purwaningsih (2012) | Jurnal economic Vol. 2 No.6 Tahun 2012 | **Variabel Independen (X)** : *Tax Avoidance* **Variabel Dependen (Y)** : *Cost Of Debt* | Analisis Regresi Sederhana, Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Koefesien Determinasi | Berdasarkan analisa yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa ETR sebagai proksi *tax avoidance* berpengaruh negative terhadap *cost of debt* |

**Sumber: Jurnal yang telah di publikasi**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan sekarang :

| No | Judul | Penulis | Variabel | Alat Uji |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pengaruh *Corporate Governance Index*, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance* Terhadap Biaya Hutang Pada *Corporate Governance Perception Index* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 | Nani Astati (2017) | **Independent (X) :**<br>**X1.** *Corporate Governance Index*<br>**X2.** Struktur Kepemilikan<br>**X3.** Ukuran Perusahaan<br>**X4.***Tax Avoidance*<br>**Dependen (Y):**<br>Biaya Hutang | Data Panel (*Eviews* 9) |

Persamaan penelitian yang dilakukan dari penelitian terdahulu adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai Biaya Hutang. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat pada variabel penelitian Perusahaan dan periode pengamatan. Alasan penelitian menambahkan variabel *tax avoidance* karena menurut **Lim** (**2011**), dengan adanya *tax avoidance* dapat mengurangi kecendrungan perusahaan untuk berutang sehingga meningkatkan *financial slack*, mengurangi kemungkinan terjadinya kebangkrutan, memiliki resiko kebangkrutan lebih rendah sehingga akan mengurangi *cost of debt.*

Penelitian yang dilakukan rujukan penelitian **Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina** (**2015**). Variabel yang digunakan didalam penelitian ini adalah variabel *Corporate Governance Index*, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance* perusahaan yang diteliti adalah *Corporate Governance Perception Index* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.12. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen *corporate governance index*, struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan *tax* avoidance terhadap variabel dependen biaya hutang (*cost of debt),* dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh baik secara parsial maupun simultan dan pengujian analisis diskriminan (*adjusted R square)* untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel independen tersebut terhadap baiya hutang (*cost of debt*). Periode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian adalah dari tahun 2012-2015 pada *Corporate Governance Perception Index.*

Menurut **Chen dan Jian** (**2006**) menguji pengaruh dari praktek *corporate governance*, dengan menggunakan *Information Disclosure and Transparancy Rankings System* (IDTRs) terhadap biaya hutang dan menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan dan transparansi yang tinggi memperoleh biaya hutang yang lebih rendah. Penerapan *good corporate governance* yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan karena mengurangi resiko perusahaan dari keputusan-keputusan pihak manajemen yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. *Good corporate governance* yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan para investor. Peningkatan kepercayaan investor tersebut disebabkan karena penerapan

GCG dianggap mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya.

Menurut **Natalia dan Sun** (**2013**) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial diartikan sebagai proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan ikutnya manajer dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi atau mencegah *agency coflict* yang terjadi diantara pemegang saham dan manajer. Manajer yang bertindak sebagai pemegang saham tentu akan bertindak sesuka hati terutama dalam hal pengambilan keputusan kebijakan hutang untuk mementingkan urusan pemegang saham.

Menurut **Juniarti dan Sentosa** (**2009**) menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya utang. Hal ini menunjukan bahwa adanya pengaruh yang berarti sebagai tindakan *monitoring* yang dilakukan kepada pihak manajemen. Dengan adanya tindakan *monitoring* yang dilakukan terhadap pihak manajemen dapat menjaga kinerja perusahaan tetap baik, sehingga kreditur memandang resiko perusahaan rendah.

Menurut **Bhoraj dan Sengupta** (**2003**) Perusahaan yang memiliki total asset lebih besar diperkirakan memiliki biaya utang yang lebih rendah. Semakin besar total aset perusahaan, diharapkan perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian (*return*) yang lebih pasti kepada investor sehingga resiko perusahaan mengalami default akan menurun. Sebagai hasilnya, biaya utang yang ditanggung oleh perusahaan pun menjadi lebih rendah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menurut **Lim** (**2011**) menunjukkan bahwa kegiatan pajak yang disukai seperti *tax shelters* dan *tax avoidance* adalah pengganti dari penggunaan utang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan utang lebih kecil ketika mereka terlibat dalam perencanaan pajak. Penelitian yang telah diungkapkan diatas menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk berutang sehingga meningkatkan *financial slack*, mengurangi kemungkinan terjadinya kebangkrutan, memiliki risiko *kebangrutan* lebih rendah sehingga akan mengurangi *cost of debt*.

Dari landasan teori, tujuan penelitian dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar 2.1. Kerangka pemikiran tersebut, menunjukan pengaruh variabel independen baik secara parsial maupun simultan terhadap variable dependen yaitu biaya hutang (*cost of debt).*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**

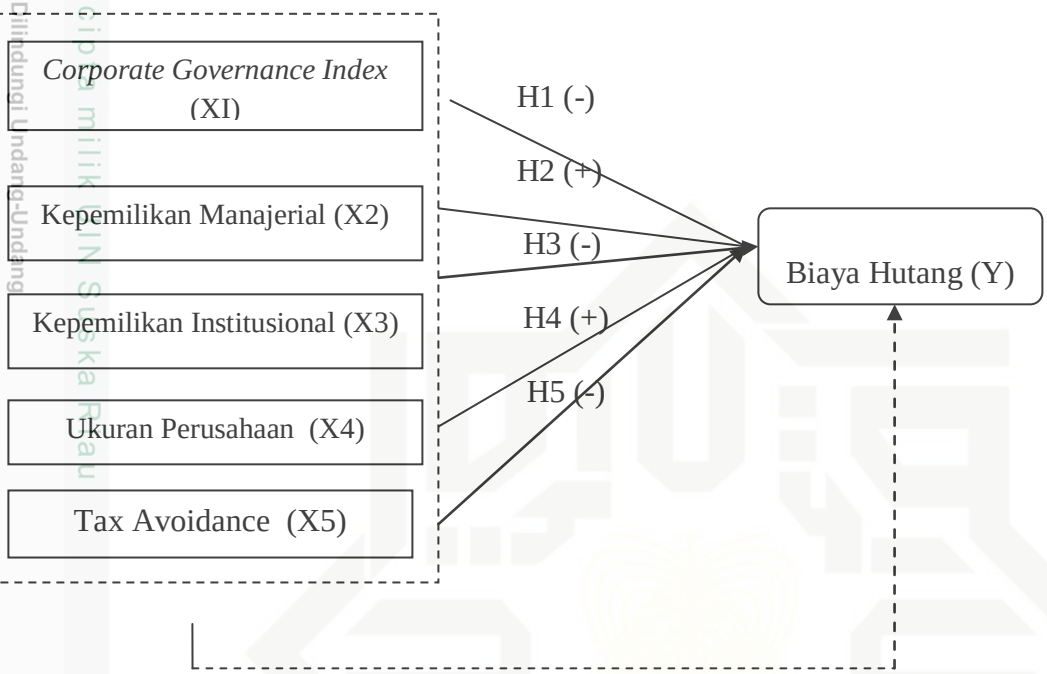


**Sumber : Dari Jurnal Ibnu Reza (2015)**

## 2.13 Hipotesis

### 2.13.1 Pengaruh *Corporate Governance Index* Terhadap Biaya Hutang

Penerapan *good corporate governance* yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan karena mengurangi resiko perusahaan dari keputusan-keputusan pihak manajemen yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. *Good corporate governance* yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan para investor. Peningkatan kepercayaan investor tersebut disebabkan karena penerapan GCG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dianggap mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya.

Kualitas *corporate governance* juga dianggap turut mempengaruhi besarnya biaya hutang perusahaan. *corporate governance index* yang tinggi merupakan alat penjamin bagi kreditor bahwa dana yang diberikan dikelola dengan baik, oleh karena itu kreditor tidak ragu untuk memberikan pendanaan terhadap perusahaan tersebut. Kreditor menilai perusahaan dengan *corporate governance index* tinggi mampu mengembalikan dana yang dipinjamnya karena perusahaan dengan nilai *corporate governance* yang rendah akan sulit mendapatkan pendanaan karena kreditor ragu-ragu dalam memberikan dana kepada perusahaan tersebut (**Rebecca,2012**). **Piot dan Missonier-Pierra** (**2007**) membuktikan bahwa kualitas *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi biaya hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan.

**HI** : **Diduga *Corporate Governance Index* Tidak Berpengaruh Terhadap Biaya Hutang**

### 2.13.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Biaya Hutang

Kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi konflik antara principal dan agent. Adanya kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara agent dan principal sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham. Kepemilikan saham

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

manajerial dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan, salah satunya keputusan pendanaan yang dilakukan perusahaan. pihak manajemen yang tinggi akan mendorong dilakukannya pengendalian terhadap perusahaan oleh manajemen, ,maka mereka akan lebih cenderung untuk menggunakan prinsip ekonomi liberal. **Ismiyati dan Hanafi** (**2003**) menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya hutang dan hasil pengujiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang.

**H2 : Diduga Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Biaya Hutang**

### 2.13.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Hutang

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk mengurangi konflik yang terjadi antara para pemegang saham dengan manajer. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kinerja perusahaan kerana adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang ketat dari pihak investor institusional, akan meningkatkan kinerja manajemen untuk menunjukkan kinerja sebuah perusahaan yang lebih baik dan dapat mencegah terjadinya kecurangan yang akan dilakukan oleh manajer. Dan dengan adanya pengawasan yang ketat dapat membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik, sehingga kreditur memandang resiko perusahaan rendah. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan institusi rendah akan mempengaruhi kinerja karyawan perusahaan terebut karena kurangnya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pengawasan dari pihak luar. **Juniarti dan Sentosa** (**2009**) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang.

**H3 : Diduga Kepemilikan Institusional Tidak Berpengaruh Terhadap Biaya Hutang**

### 2.13.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Hutang

Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak dan memiliki nilai jangka panjang. *Agency theory* menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, sehingga konsekuensinya perusahaan besar didorong untuk mengungkapkan lebih banyak tentang informasi keuangan. Besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar ukuran perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut memiliki kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman yang semakin besar pula.

Ukuran perusahaan yang besar akan mudah mendapatkan pendanaan atau utang dari kreditor sehingga biaya hutang akan tinggi. Kreditur akan menilai ukuran perusahaan yang tinggi dianggap melunasi kewajibannya diperiode mendatang. **Rebecca** (**2012**) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang yang diterima perusahaan.

**H5 : Diduga Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Biaya Hutang**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

### 2.13.5 Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Biaya Hutang

Perusahaan selalu mengupayakan tingkat laba yang tinggi. Banyak beban yang dapat mengurangi tingkat laba yang diharapkan, salah satunya adalah pembayaran pajak. Salah satu upaya perusahaan dalam mengurangi jumlah beban pajak adalah dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* sengaja dilakukan perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayarn pajak yang harus dilakukan perusahaan.

Didalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankannya, perusahaan mempunyai dua sumber usaha memperoleh pendanaan, salah satunya dari pinjaman kreditor atau investor. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, dipandang kreditor sebagai tindakan yang mengandung resiko sehingga justru meningkatkan *cost of debt* **Masri dan Martani** (**2011**). Dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* dan *cost of debt* berhubungan positif, dimana *tax avoidance* dianggap sebagai resiko. *Tax avoidance* terbukti menyebabkan *cost of debt* menjadi lebih besar, karena kreditor menilai prilaku *tax avoidance* perusahaan sebagai suatu resiko.

**H5** : **Diduga *Tax Avoidance* Tidak Berpengaruh Terhadap Biaya Hutang**

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU